

ABSTRAK

Program Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat bertujuan untuk menanggulangi kebiasaan petani yang kerap melakukan tebang butuh yang berakibat pada terganggunya ekosistem lingkungan dan tidak tercapainya nilai optimal kayu. Pinjaman ini dilakukan dengan menggunakan perjanjian kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia dengan pohon sebagai objeknya. Dalam konteks perjanjian kredit dengan konstruksi jaminan fidusia, tidak sedikit kasus di mana debitor melakukan ingkar janji (wanprestasi) berupa kelalaian dalam melaksanakan prestasi pembayaran utang atau kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan jaminan fidusia pada program pinjaman tunda tebang hutang dan mengetahui penyelesaian kredit macet dalam program pinjaman tunda tebang hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian hukum ini adalah yuridis-empiris yang berspesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dengan wawancara. Teknik analisis data dengan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Implementasi jaminan fidusia pada Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat terdapat beberapa rangkaian proses mulai dari permohonan hingga pengembalian dana, penerapan jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai alat legal formal, tetapi juga mengubah kebiasaan petani hutan rakyat; 2) Dalam praktik di lapangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai pihak kreditur lebih mengedepankan penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi sebagai bentuk penyelesaian yang cepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan BPD LH dalam masalah kredit macet dilakukan dengan upaya perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci: Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat, Jaminan Fidusia, Kredit Macet.

ABSTRACT

The Community Forest Delay Loan Program aims to address the habit of farmers who often carry out felling, which results in disruption of the environmental ecosystem and the failure to achieve optimal wood value. This loan is carried out using a credit agreement burdened with fiduciary guarantees with trees as the object. In the context of credit agreements with fiduciary guarantee construction, there are many cases where debtors break their promises (default) in the form of negligence in carrying out debt repayment achievements or bad debts. This study aims to determine the application of fiduciary guarantees in the loan program for the postponed logging debt and to determine the settlement of bad debts in the loan program for the community forest in Gunung Kidul Regency. The approach method used by the author in this legal research is a juridical-empirical approach with analytical descriptive specifications. The data collection method uses primary data through interviews. The data analysis technique uses qualitative analysis. The results of this study are: 1) The implementation of fiduciary guarantees in the Loan for the Community Forest Delay Loan consists of several series of processes starting from the application to the return of funds, the application of fiduciary guarantees not only functions as a formal legal tool, but also changes the habits of community forest farmers; 2) In practice, the Environmental Fund Management Agency (BPDLH), as the creditor, prioritizes non-litigation dispute resolution as a fast, efficient, and community-oriented approach to resolving non-performing loans. BPDLH's resolution of non-performing loans involves preventive and repressive protection measures.

Keywords: Community Forest Delay Loan, Fiduciary Guarantee, Non-Performing Loan.